

BAB - III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Misi ini dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan asset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat, selanjutnya upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Provinsi Sumatera Utara terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017

Sebelum membahas tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, tentunya perkembangan ekonomi global beserta estimasinya harus diketahui terlebih dahulu disamping yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Diawali dengan pembahasan tentang proyeksi ekonomi dunia, dimana menurut World Economic Outlook yang direlease pada tanggal 19 Januari 2016 dengan tema release **"Permintaan Lemah dan Prospek Yang semakin Menurun"** menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 diperkirakan berkisar di angka 3,1 persen, di 2016 diproyeksi sebesar 3,4 persen dan pada tahun 2017 sebesar 3,6 persen.

Di Negara ekonomi maju, secara perlahan perbaikan ekonomi akan diharapkan berlanjut secara bertahap menuju ke arah yang diharapkan. Kelambanan dan ketidakseimbangan ekonomi Tiongkok telah menyebabkan jatuhnya harga komoditas, disamping beberapa ketegangan di beberapa Negara seperti Turki dan Rusia akan menyebabkan penghambat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016 dan 2017, tetapi optimistis perbaikan ekonomi akan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dibawah bayang-bayang perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tahun 2015, perekonomian global masih berada dalam posisi lemah, baik di Negara berkembang maupun Negara industri baru. Terdapat 3 kunci transisi yang dapat mempengaruhi perekonomian global yakni :

1. Masih terjadinya perlambatan dan ketidakseimbangan ekonomi Tiongkok dimana terjadi pergeseran struktur ekonomi dari Investasi dan Industri ke konsumsi dan jasa-jasa
2. Harga komoditas dan harga energi yang turun

3. Pengetatan kebijakan moneter yang diambil oleh Amerika Serikat

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dikembangkan oleh perdagangan di luar negeri, akan tetapi jauh dari harapan malah terjadi penurunan perdagangan ekspor dan impor di Tiongkok yang mencerminkan semakin melemahnya investasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dan aktifitas industry pengolahan, dan menjadikan Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah dimana pada tahun 2014 tumbuh sebesar 7,3 persen dan di tahun 2015 sebesar 6,9 persen.

Perkembangan ekonomi Tiongkok akan menentukan pada gerak langkah ekonomi Negara-negara lain, karena telah menyebabkan beberapa harga komoditas dan harga energy menjadi semakin rendah. Aktifitas industry pengolahan dan perdagangan komoditi tetap rendah di seluruh dunia, tidak hanya di Tiongkok saja tetapi berimbas pada Negara-Negara Berkembang dan Negara Industri baru.

Harga minyak dunia secara pasar telah turun sejak September 2015, yang disebabkan salah estimasi dari OPEC yang meningkatkan produksi minyak dunia untuk meningkatkan konsumsi minyak, akan tetapi diperkirakan harga minyak dunia akan tetap rendah dalam kurun waktu dua tahun kedepan sampai dengan tahun 2017.

Pada tahun 2016 perekonomian Global akan tumbuh sebesar 3,4 persen dan akan tumbuh sebesar 3,6 persen di tahun 2017, yang secara rinci disajikan per regional sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi akan melambat di kisaran 6,3 persen di tahun 2016 dan 6 persen di tahun 2017, secara umum direfleksikan dengan pelemahan pertumbuhan investasi dan ketidakseimbangan perekonomian. India dan beberapa Negara industry baru di Asia secara umum diprediksi akan tetap tumbuh meningkat, meskipun beberapa Negara akan terimbas dari pelemahan ekonomi Tiongkok dan pelemahan industry dunia.
2. Agregat PDRB Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia diprediksi akan membaik di tahun 2016, walaupun lebih rendah dari tahun 2015, pertumbuhan yang positif di kebanyakan Negara-negara ini akan berlanjut walaupun resesi ekonomi terjadi di Brasil.
3. Pertumbuhan yang lebih tinggi akan terjadi di Negara-Negara Timur Tengah, walaupun beberapa kasus geo politik dengan tensi tinggi, akan tetapi tidak begitu mempengaruhi perbaikan pertumbuhan ekonomi
4. Negara-Negara Eropa diproyeksikan akan berlanjut tumbuh, meskipun agak sedikit turun bila dibandingkan dengan tahun 2015. Rusia akan menghadapi perlambatan GDP sebab penurunan harga minyak dan adanya sanksi ekonomi, dan diprediksi masih dalam kondisi resesi di tahun 2016. Beberapa Negara persemakmuran akan menghadapi resesi juga terimbas dari resesi ekonomi Rusia dan tensi politik yang memanas, diprediksi akan bergerak moderat di 2016 dan sedikit lebih cepat di tahun 2017
5. Kebanyakan Negara di Sub Sahara Afrika , akan mengalami pertumbuhan yang lebih membaik, akan tetapi tetap terimbas dari penurunan harga komoditas dunia.

Secara grafik akan disajikan secara lengkap tentang Estimasi Perekonomian Global sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Periode 2016-2017

Region/Country	Projection	
	2016	2017
World Output	3,4	3,6
Advanced Economies	2,1	2,1
United State	2,6	2,6
Euro Area	1,7	1,7
Germany	1,7	1,7
France	1,3	1,5
Italy	1,3	1,2
Spain	2,7	2,3
Japan	1,0	0,3
United Kingdom	2,2	2,2
Canada	1,7	2,1
Other Advanced Economies 3/	2,4	2,8
Emerging Market and Developing	4,3	4,7
Commonwealth Of Independent States	0,0	1,7
Russia	-1,0	1,0
Excluding Russia	2,3	3,2
Emerging and Developing Asia	6,3	6,2
China	6,3	6,0
India5/	7,5	7,5
ASEAN-5 6/	4,8	5,1
Emerging and Developing Europe	3,1	3,4
Latin America and the Caribbean	-0,3	1,6
Brazil	-3,5	0,0
Mexico	2,6	2,9
Middle East, North Africa, Afghanistan, and pakistan	3,6	3,6
Saudi Arabia	1,2	1,9
Sub-Saharan Africa	4,0	4,7
Nigeria	4,1	4,2
South Africa	0,7	1,8

Tahun 2017 yang akan dilalui diestimasikan menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai isu domestik dan internasional akan terus menghantui kinerja perekonomian Indonesia ke depan.

Kabar baiknya adalah, tekanan inflasi sudah mulai melunak sebagai konsekuensi dari turunnya tren harga-harga komoditas di pasar internasional. Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat serta menyebabkan tren depresiasi rupiah yang cukup persisten.

Sementara itu secara internal, belum tuntasnya infrastruktur pendukung produksi juga turut menyumbang melambatnya kinerja ekspor yang pada gilirannya turut memberikan tekanan yang berlebihan pada Rupiah. Untuk tahapan awal Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menengah untuk periode 2017-2019 bisa mencapai kisaran 6,0-6,5 persen. "Peningkatan pertumbuhan ini karena paket kebijakan ekonomi pemerintah yang akan semakin terasa dampaknya, terdapat Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat

Diakhirinya pengetatan dollar Amerika Serikat akan memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate. Penurunan dari BI rate tersebut tentunya akan menjadi stimulus dalam melakukan ekspansi bisnis kedepan. Hal ini tentunya akan semakin memberikan geliat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017.

2. Melambatnya Ekonomi Mitra dagang Utama

Stagnasi yang melanda di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, apalagi pada saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menjalin kerjasama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok berdampak pada sektor riilnya sehingga membawa dampak terhadap turunnya harga komoditas di pasar internasional

Sepanjang tahun 2016, perekonomian Cina akan mengalami perlambatan yang cukup persisten yang dipicu oleh adanya kondisi *rapid aging society*. Data sepanjang tahun 2015 telah menjustifikasi terjadinya perlambatan tersebut. Bahkan IMF terus melakukan koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok sepanjang tahun 2015 dimana Tiongkok hanya tumbuh sebesar 6.7 persen saja. Di tahun 2015, perlambatan tersebut tampak semakin nyata dan persisten. Mengingat Tiongkok merupakan partner dagang terbesar untuk Indonesia (lebih dari 20 persen dari total ekspor Indonesia), maka perlambatan dari ekonomi Tiongkok juga memberikan pengaruh terhadap perlambatan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait dengan ekspor komoditas tertentu dan juga migas khususnya gas cair.

Hal ini tentunya Patut menjadi catatan bahwa faktor-faktor utama yang dewasa ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rentan akan shock. Meskipun mengalami melambat, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Tiongkok dan Singapura yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja menuju ke arah yang semakin baik.

Ekspansi fiskal melalui pengeluaran pemerintah diharapkan semakin meningkat pada periode selanjutnya sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus positif untuk menggerakkan perekonomian.

Adapun terhadap nilai inflasi sepanjang tahun 2016 akan mencapai 4.0 ± 1 persen, lebih tinggi dari inflasi sepanjang tahun 2015 yang telah mencapai 3,35 persen. Rendahnya inflasi sepanjang tahun 2015 merupakan sumbangan dari melemahnya permintaandomestik sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa akan ada tren peningkatan permintaan domestik sepanjang tahun 2016 dan 2017 yang akan datang.

Khusus untuk nilai tukar Rupiah secara umum pada tahun 2016 nanti rupiah akan mengalami depresiasi sebesar 7.2 persen secara year on year. Dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia maka akan semakin rentan terhadap gejala eksternal khususnya dalam pergerakan nilai tukar. Tekanan terhadap Rupiah juga merupakan imbas dari sikap investor yang mulai berjaga-jaga untuk mengantisipasi rencana kenaikan suku bunga the Fed.

Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

perekonomian Nasional, maka terdapat beberapa hal yang akan diproyeksikan semakin membaik baik dari aspek laju pertumbuhan PDRB, stabilitas angka inflasi, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan juga penurunan angka persentase kemiskinan.

Ad.1. Perkembangan PDRB

Pertama sekali akan dapat dilihat mengenai kondisi perkembangan PDRB Sumatera Utara, dimana Perekonomian Sumatera Utara tahun 2015 tumbuh sebesar 5,10 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa keuangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,17 persen, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 7,11 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,95 persen. Adapun secara lengkap disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 (Persen)

	Lapangan Usaha	Triw III- 2015	Triw IV- 2015	Triw IV- 2015	Laju rtumbuhan 2015	Sumber Pertumbuha n 2015
		terhadap Triw II- 2015	terhadap Triw III- 2015	terhadap Triw IV- 2014		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	(0,80)	6,98	5,60	1,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	2,11	3,81	6,40	0,08
C	Industri Pengolahan	4,06	(0,49)	5,52	3,52	0,70
D	Pengadaan Listrik, dan Gas	6,50	9,89	4,54	(1,30)	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	(1,27)	0,39	3,40	6,44	0,01
F	Konstruksi	3,22	0,80	2,01	5,52	0,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,18	(0,32)	3,27	4,36	0,77
H	Transportasi dan Pergudangan	2,48	0,42	5,70	5,49	0,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	0,28	0,85	5,66	6,95	0,15

J	Informasi dan Komunikasi	2,14	0,07	7,43	7,11	0,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	3,49	11,14	7,17	0,22
L	Real Estate	1,91	1,86	6,34	5,76	0,24
M,N	Jasa Perusahaan	2,80	1,44	4,49	5,86	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,27	1,33	4,67	5,83	0,19
P	Jasa Pendidikan	8,50	(0,11)	9,79	5,03	0,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	1,51	4,71	6,93	0,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,24	2,38	8,06	6,69	0,03
	PDRB	3,22	0,09	5,32	5,10	5,10

Sementara jika dilihat dari struktur PDRB menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (22,01 persen); industri pengolahan (20,21 persen); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,43 persen), dengan secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Struktur PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 (Persen)

No	Kategori	Uraian	2015*
			Total
(1)	(2)	(3)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.01
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.35
3	C	Industri Pengolahan	20.21
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.10
5	E	Pengadaan Air	0.10
6	F	Konstruksi	13.61
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.43
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.99
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.41
10	J	Informasi dan Komunikasi	1.95
11	K	Jasa Keuangan	3.35
12	L	Real Estate	4.50
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.96
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.71
15	P	Jasa Pendidikan	1.87
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.93
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0

Sementara dari aspek pengeluaran pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,10 persen terjadi pada beberapa komponen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 4,70 persen, diikuti oleh PMTB sebesar 3,96 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,45 persen, dengan sajian lengkap sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Penggunaan
Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 (Persen)

Komponen	Terhadap			Pertumbuhan 2015	Pertumbuhan 2015
	Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw IV- 2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,25	0,72	4,48	4,70	2,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,97	1,91	5,29	-0,41	0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,76	15,98	1,39	2,45	0,18
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,20	1,14	4,55	3,96	1,17
Perubahan Inventori	-62,03	75,73	72,78	22,50	0,52

Ekspor Barang dan Jasa	5,76	2,10	2,36	-1,56	-0,71
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-0,36	10,99	1,41	-4,07	-1,53
PDRB	3,22	0,09	5,32	5,10	5,10

Selanjutnya jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terlihat dari sisi nominal Rupiah terjadi peningkatan, akan tetapi jika dikonversi ke nilai tukar Dollar Amerika Serikat, maka terlihat trend penurunan nilai PDRB/Kapita dari tahun 2013 US\$ 3.301,49 menurun menjadi US\$ 3.194,64 dan menurun kembali menjadi hanya sebesar US\$ 3.066,41 atau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan nilai konversi sebesar 7,11 persen dimana secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.
PDRB per Kapita Sumatera Utara Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai PDRB (Milyar Rp)	469 464,02	521 954,95	571 722,01
Penduduk Proyeksi (jiwa)	13 590 250	13 766 851	13 937 797
Kurs USD	10 463,20	11 867,96	13 377,04
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
Nilai (Juta Rp)	34,54	37,91	41,02
Nilai (US\$)	3 301,49	3 194,64	3 066,41

Ad.2. Perkembangan Inflasi

Inflasi Sumatera Utara tahun 2015 dapat dikendalikan pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi $4\pm 1\%$. Keberhasilan tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam mengelola harga komoditas strategis (administered prices) khususnya harga BBM. Pasokan bahan pangan juga dapat dijaga dengan baik. Ditengah gejolak yang sempat muncul, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara melakukan berbagai program jangka pendek dan menengah untuk mengelola pasokan barang dan jasa. Komitmen tersebut berhasil menjaga tingkat inflasi volatile foods berada dibawah historisnya serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara permintaan yang diindikasikan meningkat menyebabkan kenaikan inflasi inti. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sumatera Utara tercatat sebesar 3,24%, jauh lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 8,17%.

Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada penghujung 2015 menurun jauh dibanding tahun sebelumnya. Inflasi 2015 adalah sebesar 3,24%, jauh lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 8,17%. Angka tersebut juga sedikit dibawah angka nasional yang mencapai 3,35% (yoy). Penurunan inflasi tahunan (yoy) Sumatera Utara mulai terlihat sejak triwulan II 2015. Secara triwulanan, inflasi tercatat menurun dari 7,82% pada triwulan II, 6,62% pada triwulan III, menjadi 3,24% di akhir tahun. Penurunan inflasi pada akhir tahun 2015 terjadi di semua kota penghitungan IHK di Sumatera Utara.

Berbagai komoditas yang muncul sepanjang tahun 2015 sebagai inflatoir maupun deflatoir karena berbagai kondisi diantaranya siklus pasokan yang tergantung masa tanam/panen komoditas dan faktor cuaca, serta kebijakan penetapan harga BBM dan listrik oleh pemerintah. Di sisi permintaan, faktor musiman terkait perayaan hari besar dan tahun ajaran baru mendorong kenaikan harga barang tertentu. Selain itu, berbagai langkah non-konvensional untuk mengurangi pasokan seperti pengafkiran bibit ayam serta faktor eksternal terkait nilai tukar juga mempengaruhi naik/turunnya harga barang dan jasa di sepanjang tahun 2015. Adapun komoditas tersebut adalah :

Tabel 3.6.
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Sepanjang Tahun 2015 di Sumatera Utara

Rank	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
		(%, qtq)		(%, qtq)
1	Beras	0,46	Bensin	-0,79
2	Rokok Kretek Filter	0,29	Cabai Merah	-0,46
3	Kontrak Rumah	0,25	Angkutan Dalam Kota	-0,26
4	Angkutan Udara	0,23	Tongkol/Ambu-ambu	-0,04
5	Bawang Merah	0,20	Kangkung	-0,04
6	Bahan Bakar RT	0,17	Minyak Goreng	-0,03
7	Sekolah Dasar	0,16	Cabe Hijau	-0,03
8	Tarif Listrik	0,13	Cabai Rawit	-0,03
9	Daging Ayam Ras	0,12	Angkutan Antar Kota	-0,02
10	Rokok Kretek	0,12	Sabun Detergen Bubuk	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya realisasi inflasi 2015 dibanding 2014 adalah kebijakan penetapan harga BBM oleh pemerintah serta semakin

tingginya komitmen TPID Sumut untuk menjaga pasokan pangan melalui berbagai program jangka pendek dan menengah. Ekspektasi inflasi masyarakat menjadi lebih terjaga dengan stabilnya inflasi administered prices dan volatile foods tersebut

Ad.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja dan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2015 mencapai 6,39 juta orang atau bertambah sekitar 119 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2014, yaitu sebesar 6,27 juta orang. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 mencapai 5,96 juta orang atau bertambah sekitar 81 ribu orang dibanding Agustus 2014, yaitu sebesar 5,88 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari 391 ribu pada Agustus 2014 menjadi 429 ribu pada Agustus 2015 atau bertambah sebanyak tiga puluh delapan ribu orang.

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja dan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2015 mencapai 6,39 juta orang atau bertambah sekitar 119 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2014, yaitu sebesar 6,27 juta orang. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 mencapai 5,96 juta orang atau bertambah sekitar 81 ribu orang dibanding Agustus 2014, yaitu sebesar 5,88 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari 391 ribu pada Agustus 2014 menjadi 429 ribu pada Agustus 2015 atau bertambah sebanyak tiga puluh delapan ribu orang.

Tabel 3.7.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kegiatan Utama Tahun 2014 dan 2015

	Kegiatan Utama	Satuan	Agustus 2014 ^{*)}	Agustus 2015 ^{*)}	Selisih
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan Kerja	Ribuan Orang	6 272	6 391	119
	- Bekerja	Ribuan Orang	5 881	5 962	81
	- Pengangguran terbuka	Ribuan Orang	391	429	38
2	Bukan Angkatan Kerja	Ribuan Orang	3 079	3 108	29
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,07	67,28	0,21
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,23	6,71	0,48
5	Pekerja Tidak Penuh				
	- Setengah Menganggur	Ribuan Orang	487	604	117
	- Paruh Waktu	Ribuan Orang	1 371	1 370	-1

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2014, dan Agustus 2015

Keterangan : *) Menggunakan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Ad.4. Persentase Penduduk Miskin

Seiring dengan kondisi nasional, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,5 juta jiwa atau 10,8% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 1,4 juta jiwa atau 9,9% dari total penduduk.

Dalam waktu 6 bulan, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan 44.000 jiwa penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi terkait menurunnya tingkat pendapatan meski daya beli relatif terjaga.

Secara spasial, Sumut masuk ke dalam 5 besar provinsi dengan penambahan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia, bersama dengan Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Secara nasional, Sumatera Utara masih menduduki peringkat 17 nasional berdasarkan urutan jumlah persentase penduduk miskin terbesar. Tingkat kemiskinan yang semakin melebar ini tidak lepas dari karakteristik Sumatera Utara yang memang sangat menggantungkan aktivitas ekonominya pada perkebunan. Tahun 2015 memang memberikan pukulan yang cukup berat akibat perkembangan harga dan permintaan yang kurang mengembirakan.

Selama periode September 2014 s.d. September 2015, persentase kemiskinan meningkat tajam di pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan di Sumatera Utara bertambah 87.280 orang menjadi 11,06% dari total penduduk desa. Sementara itu, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 60.290 orang menjadi 10,51% dari total penduduk kota (Grafik 5.8). Secara historis, persentase penduduk miskin di desa memang selalu lebih tinggi dibandingkan di kota. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir, namun tingkat kemiskinan di desa kembali meningkat signifikan pada September 2015, sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut :



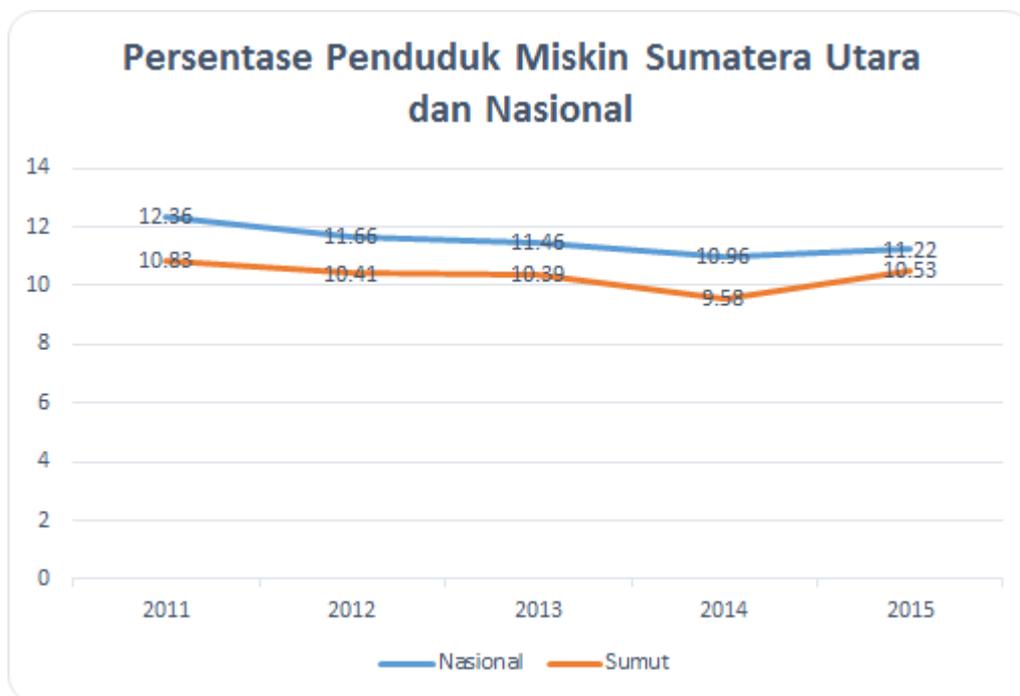
Sumber: BPS

Grafik 3.1
Grafik Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan
di Sumatera Utara

Meningkatnya kemiskinan di pedesaan diduga karena daya beli masyarakat desa yang masih terbatas. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani yang masih berada di bawah 10020, jauh lebih rendah bila dibandingkan tahun 2014. Hal ini

terjadi baik untuk tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura. Hal tersebut terutama dipengaruhi normalisasi harga komoditas yang berjalan lambat.

Adapun jika dibandingkan dengan Nasional, maka capaian pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara terlihat lebih baik, hal ini terjadi sejak tahun 2011 dimana disparitas persentase penduduk miskin antara Sumatera Utara dan Nasional sebesar 1,53 persen, akan tetapi disparitas ini semakin kecil bahkan di tahun 2015 hanya sebesar 0,69 persen, tentunya ini menjadi salah satu perhatian khusus, sebab terdapat beberapa Provinsi di Indonesia yang secara lebih cepat mengurangi persentase penduduk miskinnya di banding upaya Provinsi Sumatera Utara. Adapun secara rinci disajikan pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2
Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin Antara Nasional dengan Provinsi Sumatera Utara

Setelah mengetahui kondisi terkini tentang perkembangan makro ekonomi utama yang disajikan di atas, berikut akan disajikan proyeksi dari masing-masing kondisi yang diharapkan pada tahun 2017.

Ad 1. Agregat, Kontribusi dan Laju PDRB

Setelah memperhatikan kondisi perekonomian Global, Nasional dan juga Sumatera Utara terkini dan proyeksi yang disusun oleh beberapa analis seperti dari IMF, Bank Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal serta mempertimbangkan asumsi-asumsi, variabel pendukung dan parameter acuan, diperoleh hasil estimasi untuk besaran PDRB Sumatera Utara pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Besaran Agregat PDRB Sumatera Utara Tahun 2016 dan 2017 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

No	Kategori	Uraian	2016		2017	
			ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138,489.50	114,748.42	153,695.65	119,969.47
2	B	Pertambangan dan Penggalian	9,453.49	6,161.66	11,604.16	6,524.59
3	C	Industri Pengolahan	130,871.72	88,762.37	149,913.56	92,303.99
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	585.66	557.82	596.67	580.41
5	E	Pengadaan Air	641.90	452.38	720.02	489.52
6	F	Konstruksi	91,432.86	58,290.45	107,451.90	62,050.19
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111,613.64	82,699.81	123,121.01	88,860.95
8	H	Transportasi dan Pergudangan	33,417.67	21,790.21	39,850.57	23,339.49
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,982.27	10,532.79	18,082.34	11,349.08
10	J	Informasi dan Komunikasi	11,682.69	12,183.01	12,853.29	13,401.31
11	K	Jasa Keuangan	22,256.00	14,318.07	26,028.40	14,687.47
12	L	Real Estate	29,898.59	19,432.87	34,915.57	20,938.92
13	M,N	Jasa Perusahaan	6,432.72	4,153.49	7,587.40	4,508.61
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,175.52	15,557.19	27,765.59	16,342.83
15	P	Jasa Pendidikan	11,989.85	9,532.52	13,537.74	10,204.57
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,386.52	4,353.42	7,667.02	4,621.16
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	3,472.87	2,328.46	3,988.59	2,471.67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			648,783.49	465,854.95	739,379.48	492,644.22

Dari tabel di atas berdasarkan data baseline tahun 2015, maka besaran PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 648,78 triliun, dan akan diproyeksikan menjadi Rp. 739,38 triliun. Demikian pula dengan Agregat PDRB ADHK dengan Tahun dasar 2010 akan semakin meningkat dari Tahun 2016 yang diestimasikan akan berada di angka Rp. 465,85 triliun meningkat menjadi Rp. 492,64 triliun.

Selanjutnya jika dilihat dari kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB, terlihat bahwa pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi akan sedikit lebih baik dari tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,10 persen, maka optimism di tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 akan mencapai 5,65 persen dan di tahun 2017 diestimasikan berada di kisaran 5,75 persen. Demikian pula terkait dengan postur PDRB Sumatera Utara tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh Industri Pengolahan dan diurutan ketiga Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Adapun secara rinci disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan Serta Kontribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 dan 2017
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

No	Kategori	Uraian	2016		2017	
			Laju	Kontribusi	Laju	Kontribusi
(1)	(2)	(3)				
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.20	21.35	4.55	20.79
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5.69	1.46	5.89	1.57
3	C	Industri Pengolahan	3.25	20.2	3.99	20.3
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	3.05	0.1	4.05	0.1
5	E	Pengadaan Air	7.21	0.1	8.21	0.1
6	F	Konstruksi	7.45	14.1	6.45	14.5
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.35	17.2	7.45	16.7
8	H	Transportasi dan Pergudangan	8.11	5.2	7.11	5.4
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.75	2.5	7.75	2.4
10	J	Informasi dan Komunikasi	10.20	1.8	10.00	1.7
11	K	Jasa Keuangan	2.58	3.4	2.58	3.5
12	L	Real Estate	7.25	4.6	7.75	4.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	8.25	1.0	8.55	1.0
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.25	3.7	5.05	3.8
15	P	Jasa Pendidikan	7.05	1.8	7.05	1.8
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.05	1.0	6.15	1.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	6.85	0.5	6.15	0.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			5.65	100.0	5.75	100.0

Sementara jika melihat dari sisi penggunaan, maka besaran PDRB Sumatera Utara disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.10
Besaran Agregat PDRB Sumatera Utara
Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan 2017
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

Komponen Pengeluaran	2016		2017	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	340,741.09	238,238.22	397,342.53	246,174.32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,190.27	5,357.33	6,580.48	5,714.67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	50,280.72	34,286.92	65,435.08	38,771.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	207,286.33	140,222.34	231,056.09	151,980.74
5. Perubahan Inventori	15,765.44	4,658.55	6,654.42	4,926.44
6. Ekspor Luar Negeri	234,210.84	205,442.03	240,076.52	216,763.46
7. Impor Luar Negeri	204,691.19	162,350.45	207,765.63	171,686.51
PDRB	648,783.49	465,854.95	739,379.48	492,644.22

Dari table di atas diperoleh hasil bahwa diestimasikan pada tahun 2016 Besaran PDRB Sumut menurut Penggunaan akan didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, disusul kedua oleh Ekspor Luar Negeri. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dan struktur PDRB menurut pengeluaran, akan disajikan pula dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.11

Laju dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan 2017

Komponen Pengeluaran	2016		2017	
	Laju	Kontribusi	Laju	Kontribusi
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.46	52.52	3.33	53.74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18.65	0.80	6.67	0.89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.42	7.75	13.08	8.85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.65	31.95	8.39	31.25
5. Perubahan Inventori	(61.04)	2.43	5.75	0.90
6. Ekspor Luar Negeri	8.38	36.10	5.51	32.47
7. Impor Luar Negeri	7.45	31.55	5.75	28.10
PDRB	5.65	100.00	5.75	100.00

Pada tahun 2016 dengan asumsi estimasi berdasarkan data baseline tahun 2015, maka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan mencapai 5,65%, lebih baik dari realisasi capaian tahun 2015 yang mencapai 5,10 persen, dan pada tahun 2017 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun 2016, maka laju pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,75 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi akan diduduki oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,08 persen, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,39 persen, adapun laju pertumbuhan terkecil akan di tempati oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya diestimasikan tumbuh sebesar 3,33 persen.

Dari sisi distribusi PDRB menurut aspek pengeluaran, maka pengeluaran konsumsi Rumah tangga pada tahun 2017 akan tetap menempati urutan terbesar terhadap sumbangan PDRB yakni 53,74 persen, disusul oleh ekspor luar negeri sebesar 32,47 persen. Adapun kontribusi terkecil akan diberikan oleh perubahan inventori yakni sebesar 0,90 persen.

Ad 2. Besaran Inflasi

Pada tahun 2016 dan juga tahun 2017 Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, daya beli masyarakat yang membaik diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan akan barang dan jasa. Sementara itu, pasokan barang khususnya bahan pangan diperkirakan masih memadai. Tekanan inflasi dari penyesuaian harga komoditas yang diatur Pemerintah juga relatif terkendali. Dengan kondisi tersebut, inflasi pada triwulanan tahun 2016 dan tahun 2017 diperkirakan berada dalam kisaran 4,0 ±1%.

Rendahnya harga minyak mentah di pasar global meningkatkan keyakinan akan kembali tercapainya inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Produksi minyak yang terus digenjot meski pasokan sudah cukup melimpah menyebabkan resiko kenaikan harga yang relative minim. Koordinasi pengendalian inflasi antara bank Indonesia dengan Pemerintah melalui forum TPI/TPID yang telah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan diperkirakan akan dapat menjaga stabilisasi angka inflasi di Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi terkendali, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi TPID dalam mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan yang bergejolak.

2. Melanjutkan program peningkatan produksi pangan maupun diversifikasi konsumsi masyarakat melalui komunikasi yang lebih intensif
3. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan, pengadaan lahan maupun penguatan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini juga penting untuk meningkatkan perdagangan antar wilayah.
4. Mendukung peningkatan kapabilitas UMKM yang bergerak dalam industri pangan untuk meredam fluktuasi harga akibat panen.
5. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai program sertifikasi lahan pertanian dan skema pembiayaan petani untuk meningkatkan akses pembiayaan.

Ad. 3. Besaran Angkatan Kerja/Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015, serta estimasi akan semakin membaiknya ekonomi di Tahun 2016 dan 2017, maka pada tahun 2017 akan terjadi pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun tidak begitu besar, secara holistic disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Kondisi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera
Tahun 2013 sd 2015 serta
Proyeksi Tahun 2016 dan Tahun 2017

TAHUN	INDIKATOR					
	LPE (%)	JUMLAH ORG BEKERJA (org)	L. KERJA BARU (org)	TPT	ANGKATAN KERJA	%tpt
2013	6.01	6,359,661	215,061	399,876	6,759,537	5.92
2014	5.23	5,881,000	(478,661)	391,000	6,272,000	6.23
2015	5.10	5,962,000	81,000	429,000	6,391,000	6.71
2016	5.65	6,157,554	195,554	421,981	6,579,535	6.41
2017	5.75	6,350,285	192,731	391,106	6,741,391	5.80

Dari table di atas diproyeksikan bahwa pada tahun 2016 angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara akan berjumlah 6.579.535 orang dengan rincian jumlah orang bekerja sebanyak 6.157.554 orang dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,41 persen atau sebanyak 421.981 orang. Adapun untuk tahun rencana 2017 di proyeksikan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara akan berjumlah 6.741.391 orang dengan rincian jumlah orang yang bekerja sebesar 6.350.285 orang serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,80 persen atau sebanyak 391.106 orang.

Ad 4. Besaran Angka Persentase Penduduk Miskin

Proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk Sumatera Utara untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin terhadap penduduk Sumatera Utara diproyeksikan sebesar 10,05 persen dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,55 persen (kembali ke single digit) seperti capaian pada tahun 2014 sebesar 9,58 persen.

Dalam kurun 2 tahun kedepan diharapkan persentase penduduk miskin akan kembali mengalami trend penurunan, sebagai dampak beberapa pembangunan strategis di Sumatera Utara yang akan menciptakan lapangan kerja, dan

peningkatan pertumbuhan ekonomi serta terjaganya nilai inflasi, sementara di pertanian diharapkan angka Nilai Tukar Petani akan berada di atas 100.

Secara umum disajikan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk Sumatera Utara Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun \ Indikator	2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Kemiskinan (%)	10.05	10.45	9.55	10.00

Sumber : Hasil Analisis MAkro Ekonomi Sumatera Utara, Bappeda 2016

3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tantangan dan prospek perekonomian Sumatera Utara, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Sumatera Utara sendiri.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2016-2017 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017

No.	URAIAN	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
	a. Range	5,40 - 5,75	5,50 - 5,80
	b. Moderat	5,65	5,75
2	EKONOMI SUMUT (2010=100)		
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB - Milyar	648.783,49	739.379,48
	b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK- Milyar	465.854,95	492.644,22
3	PER KAPITA (juta rupiah/tahun)	45,99	51,78
4.	Inflasi	4 + <u>1</u>	4 + <u>1</u>
5.	Persentase Penduduk Miskin	10,05	9,55
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,41	5,80

Untuk tahun 2016 dan 2017 berdasarkan PDRB lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan, Sektor Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara dari sisi investasi, prospek investasi juga akan cerah, hal ini didorong oleh berbagai faktor antara lain stabilitas makroekonomi yang diperkirakan tetap akan terjaga serta potensi pasar di Indonesia begitu pula dengan Sumatera Utara karena besarnya jumlah populasi dibanding daerah Provinsi lainnya di luar pulau Jawa, sementara hal yang menggembirakan adalah akan beroperasinya secara resmi beberapa pembangkit listrik skala besar di Sumatera Utara seperti PLTU Pangkalan Susu II dan beberapa beskala mini dan mikro selain itu juga akan dielesaikan perluasan Bandara Sibisa dan Silangit, disamping juga bahwa pada tahun 2017 di Sumatera Utara akan dibangun beberapa Proyek berskala nasional seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional MEBIDANG; Pembangunan Bendungan Lausimeme; Pembangunan Semelter di Kuala Tanjung dan Percepatan Infrastruktur Transportasi, listrik dan air bersih untuk KSPN Danau Toba.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. **Disiplin Anggaran**, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang disajikan sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2017

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1). Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD pada RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 diproyeksikan akan sedikit lebih baik dari capaian tahun 2015 yang berada di angka 5,10 persen dan unuk tahun 2016 diestimasikan akan tumbuh sebesar 5,65 persen, sementara untuk tahun 2017 diestimasikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen. Dengan asumsi tersebut maka Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 akan diestimasikan tumbuh sebesar 5,62 persen dibandingkan dengan tahun 2016 Rp. 4.919.272.204.432,- atau meningkat sebesar Rp. 276.565.652.890,-, bila dibandingkan dengan Agregat PDRB Sumut Tahun 2017, maka PAD Sumatera Utara adalah 0,67%.

- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14 persen tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 85,35%; hal ini berdampak pada estimasi komponen PAD seperti Pajak Daerah yang tahun 2017 diproyeksikan pada Rp. 4.445.566.154.906,- atau meningkat sebesar 6,64 persen dari Tahun 2016. Demikian pula dengan Retribusi daerah yang merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari pos-pos pendapatan pada berbagai SKPD hanya diprediksi meningkat moderat sebesar 2 persen menjadi Rp. 32.603.900.823,-, khusus untuk pos pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga akan mengalami peningkatan moderat sebesar 3,00 persen menjadi Rp. 269.462.082.649,- dan pos pendapatan asli daerah yang terakhir yakni dari lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan mengalami peningkatan moderat sama dengan ketiga pos PAD lainnya yakni sebesar 2,00 persen menjadi Rp. 171.640.066.054-
- c. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Anggaran 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru, serta adanya operasi penertiban terhadap pelanggaran pembayaran pajak .

2). Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sebesar 15,60 persen dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan dalam pengelolaan SMA dan SMK menjadi urusan Provinsi, yang berimplikasi bahwa gaji beserta tunjangan Guru SMA/SMK beserta pemeliharaan Gedung Sekolah dan Administrasi lainnya ditanggung APBD Provinsi;
- b. Peningkatan DAU dari APBD TA. 2015 ke APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar 40,84 persen, sehingga diperkirakan secara moderat bahwa pada tahun 2017 akan terjadi peningkatan DAU sebesar 20,70 persen;
- c. Peningkatan DAK akan meningkat secara trend sejak tahun 2016 terjadi peningkatan DAK sebesar 75,46 persen dari tahun 2015, secara nominal dari Rp. 86.812.510.000,- menjadi Rp. 152.322.490.000,-, sementara untuk tahun 2017 diestimasikan masih akan tetap naik walaupun tidak sebesar Tahun 2016, di angka Rp. 158.415.389.600 atau naik 4,00 persen.

3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diproyeksikan naik rata-rata sebesar 4,09%.
- b. Berkurangnya pos dana annual fee mulai tahun 2014 dari sumbangan PT. Inalum yang sejak tahun 2014 telah resmi menjadi BUMN, sehingga MOA yang mengatur tentang annual fee secara otomatis akan tidak berlaku lagi.

- c. Kemungkinan masih tetap adanya dana insentif daerah (DID) sebagai award atas pengelolaan keuangan daerah beserta perbaikan makro ekonomi dan social masih tetap menjadi harapan tetap dialokasikan oleh Pusat masih sebesar Rp. 39.666.323.000,-
- d. Dana BOS tetap menjadi salah satu alokasi terbesar di APBD Sumatera Utara, dan untuk Tahun 2017 diestimasikan akan meningkat sebesar 5 persen atau menjadi Rp. 3.142.666.800.000,-
- e. Terapat dua pos baru yang akan tetap menjadi harapan bagi penerimaan pendapatan daerah yakni dari Akreditasi Rumah sakit dan dari dana peningkatan pengelolaan koperasi dan UKM, akan tetapi di tahun 2017 diestimasikan besaran alokasi yang diperoleh akan tetap sama yakni RP. 444.296.000,- untuk akreditasi rumah sakit dan Rp. 3.500.000.000,- untuk pos dana peningkatan pengelolaan Koperasi dan UKM.

Adapun untuk secara garis besarnya berikut disampaikan realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yang akan datang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 s.d tahun 2018

Kod Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2014	Realisasi APBD Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.1	Pendapatan asli daerah	4,405,211,552,054	-	4,630,468,147,628	4,919,272,204,432	5,195,837,857,322
1.1.1	Pajak daerah	4,055,217,776,906		4,168,615,291,940	4,445,566,154,906	4,713,231,677,520
1.1.2	Retribusi daerah	76,984,011,321		31,964,608,650	32,603,900,823	34,234,095,864
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	156,160,197,054		261,613,672,473	269,462,082,649	272,156,703,475
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	116,849,566,772		168,274,574,565	171,640,066,054	176,215,380,463
1.2	Dana perimbangan	1,812,638,981,079	-	2,272,745,764,900	2,627,213,559,088	2,752,660,355,207
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	403,778,317,079		515,917,601,900	532,159,822,177	556,022,239,239
1.2.2	Dana alokasi umum	1,349,132,276,000		1,604,505,673,000	1,936,638,347,311	2,033,470,264,680
1.2.3	Dana alokasi khusus	59,728,388,000		152,322,490,000	158,415,389,600	163,167,851,288
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,560,378,934,211	-	3,070,774,859,639	3,196,419,879,000	3,228,264,706,720
1.3.1	Dana Otonomi Khusus				-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	1,508,790,304,934		3,036,626,619,000	3,186,277,419,000	3,217,817,972,920
1.3.3	Hibah	30,087,355,809		34,148,240,639	10,142,460,000	10,446,733,800
1.3.4	Dana darurat					-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)				-	-
1.3.6	lainnya	21,501,273,468			-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	7,778,229,467,344	-	9,973,988,772,167	10,742,905,642,520	11,176,762,919,249

Ketahanan fiskal Daerah akan terus ditingkatkan. Perkiraan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2017 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 10.742.905.642.520,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.

4.919.272.204.432,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.627.213.559.088,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.3.196.419.879.000,-.

Secara lebih rinci pada tahun 2017 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4.919.272.204.432,- meningkat sebesar 6,24 persen dibandingkan dengan tahun 2016; Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.627.213.559.088,- atau naik sebesar 15,60 persen dibandingkan dengan tahun 2016, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 4,09%% menjadi Rp. 3.196.419.879.000,- penerimaan ini belum termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015.

Dari komponen penerimaan PAD diharapkan di tahun 2017 adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah sebesar Rp. 276.950.862.966,- atau menjadi Rp. 4.445.566.154.906,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 639.292.173 menjadi Rp. 32.603.900.823,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 7.848.410.174 menjadi Rp. 269.462.082.649,- sedangkan penerimaan lainnya dari Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya diharapkan akan terjadi peningkatan sebesar 2,00 persen dari Rp. 168.274.574.565 pada tahun 2016 menjadi Rp. 171.640.066.054 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 3.365.491.489.

Selain itu, penerimaan Dana Perimbangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 yakni sebesar 15,60 persen atau bertambah sebesar Rp. 354.467.794.188. Peningkatan ini akan berasal dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang akan meningkat sebesar 3,15 persen, selain itu Dana Alokasi Umum juga akan mengalami kenaikan yang signifikan dari sejak tahun 2015, dimana tahun 2016 saja Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi DAU sebesar 1.605.505.673.000,- meningkat sangat besar dari tahun 2015 yang hanya dialokasikan sebesar 1.139.261.371.000,- atau meningkat sebesar 40,84 persen, untuk tahun 2017 memang diestimasikan akan mengalami kenaikan kembali sebesar 20,70 persen, sehingga DAU pada tahun 2017 diestimasikan akan mencapai Rp. 1.936.638.347.311,-, hal ini berkaitan dengan bertambahnya jumlah alokasi belanja pegawai sebab Guru SMA/SMK yang selama ini menjadi kewenangan Pemkab/Pemko sejak tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga akan diestimasikan meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp. 158.415.389.600,- atau meningkat sebesar 4,00 persen

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2017, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2017 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji

pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Terlebih lagi pada tahun 2017 yang akan datang kewenangan pengelolaan dan penganggaran Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- b. biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional.
 - d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 2). Belanja Hibah
- Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti BPS, KODAM, POLDA, KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; selanjutnya bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

3). Belanja Bantuan sosial

Bantuan Sosial; dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala

tertentu, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4). Belanja Bagi hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2017, sedangkan pelampauan target TA. 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam APBD Perubahan TA. 2017, pada tahun 2017 juga akan dibayarkan hutang bagi hasil Kab/Kota yang masih tertunda.

5). Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan partai politik

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan untuk :

- a. Infrastruktur;
- b. Revitalisasi pasar tradisional;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Prasarana dan sarana kesehatan;
- e. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan;
- f. Sarana dan Prasarana Pertanian;

6). Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak

terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sementara untuk kebijakan Belanja Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 memperhatikan hal-hal khusus, dimana Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2017 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
- 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
- 4) Capaian target *Visi dan Misi RPJMD Provsu Tahun 2013-2018*;
- 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
- 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.
- 7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
4. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-

rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 meliputi urusan sebagai berikut:

Urusan Wajib

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Penataan ruang;
- 5) Perencanaan pembangunan;
- 6). Perhubungan;
- 7). Lingkungan Hidup;
- 8). Sosial
- 9). Tenaga Kerja
10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 11). Penanaman modal;
- 10) Kebudayaan;
- 10) Pemuda dan Olahraga;
- 11) Keselamatan Bangsa dan Politik dalam negeri;
- 12) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 13) Ketahanan Pangan;
- 14) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 15). Komunikasi dan Informatika:
- 16). Perpustakaan

Urusan Pilihan

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 4) Kelautan dan Perikanan;
- 5). Industri

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 s.d tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2014	Realisasi APBD Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1,008,161,978,816		1,371,733,360,063	2,067,992,096,370	2,152,819,740,569
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	1,611,718,256,710		3,022,816,000,000	3,172,666,800,000	3,204,093,468,000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1,065,000,000		-	5,000,000,000	6,000,000,000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1,692,809,638,822		2,478,630,055,595	2,741,501,959,163	2,300,000,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1,053,174,611,548		178,809,909,657	200,000,000,000	300,000,000,000
2.1.8	Belanja tidak terduga	4,482,346,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,371,411,831,896	-	7,059,489,325,315	8,194,660,855,533	7,970,413,208,569
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	144,540,208,585		175,532,063,500	184,308,666,675	193,524,100,008
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1,146,647,301,401		1,472,525,876,503	1,549,097,222,081	1,580,079,166,522
2.2.3	Belanja modal	1,145,972,228,647		1,243,297,180,210	1,339,838,898,231	1,632,746,444,150
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2,437,159,738,633	-	2,891,355,120,213	3,073,244,786,987	3,406,349,710,680
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	7,808,571,570,529	-	9,950,844,445,528	11,267,905,642,520	11,376,762,919,249

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan dibedakan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah penganggaran belanja yang melebihi pendapatan. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada paragraf III tentang Pembiayaan khususnya pasal 300 sampai dengan pasal 305.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
- d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2017 diperkirakan penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2016, yang diperkirakan akan berjumlah lebih kurang Rp.525.000.000.000,-

Penggunaan dari pembiayaan antara lain diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran sementara untuk penyertaan modal diperhitungkan tidak ada penyertaan modal, selama perda belum ditetapkan.

Adapun secara rinci kondisi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 s.d tahun 2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun	Realisasi APBD Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
		2014	2015	2016	-6	-7
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	45,225,748,118		1,123,954,000	525,000,000,000	200,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,225,748,118	-	1,123,954,000	525,000,000,000	200,000,000,000
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	24,268,280,639	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	24,268,280,639	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	45,225,748,118	-	(23,144,326,639)	525,000,000,000	200,000,000,000